

BAB III

ALASAN RUSIA MELIBATKAN DIRI DALAM KONFLIK SURIAH

Banyaknya konflik yang terjadi di Suriah, baik perang sipil yang terjadi antara kelompok rezim pemerintah dengan kelompok separatis seperti Free Syrian Army (FSA) dan kelompok terorisme seperti Jabhat Al Nusra dan ISIS, maupun keterlibatan negara-negara seperti Amerika Serikat yang juga memberikan dukungannya terhadap salah satu pihak yakni FSA, membuat Rusia semakin ingin melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di Suriah ini.

Amerika Serikat yang diasumsikan Rusia sebagai negara *great power* yang terlibat dalam konflik Suriah pun menjadi catatan tersendiri bagi Rusia. Konflik internal Suriah yang kini menjadi terinternasionalisasi akibat dari kedatangan aktor-aktor internasional lain seolah menjadi ajang untuk mengukur ketangguhan kualitas dan kuantitas kekuatan militer antara Rusia dan Amerika Serikat. Rusia yang mulai melakukan intervensi militer pada tahun 2015, seolah ingin menunjukkan kepada militer Amerika Serikat bahwa Rusia masih memiliki pengaruh di kawasan Timur Tengah dan perlengkapan militer Rusia tidak dapat dipandang sebelah mata.

Sikap Rusia dalam keterlibatannya di konflik Suriah ini akan dijelaskan dengan menggunakan teori *offensive realism* yang dikemukakan oleh John Mearsheimer. Teori ini akan mengkaji sikap kebijakan luar negeri Rusia dalam intervensinya di perang sipil Suriah dengan menggunakan asumsi dasar *offensive*

realism yakni pertama, sistem internasional yang anarki membuat negara tidak memiliki jaminan atas keamanan nasionalnya sendiri. Kedua, setiap negara mempunyai kapabilitas untuk meningkatkan kekuatan militer. Dan ketiga, setiap negara tidak akan pernah mengetahui keinginan negara lain.

Teori *offensive realism* akan mengkaji pertanyaan ilmiah terkait alasan keterlibatan Rusia secara militer dalam perang sipil yang terjadi di Suriah pada tahun 2015. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Amerika Serikat yang merupakan fokus utama kebijakan luar negeri Rusia telah terlebih dahulu menerjunkan pasukannya pada tahun 2013. Sedangkan Suriah merupakan *strategic partner* bagi Rusia. Hal ini tentu menimbulkan persepsi bagi pemerintah Rusia mengingat dalam kondisi dunia yang anarki, tidak satupun negara yang dapat menjamin keamanan nasional negaranya sendiri. Setiap negara mempunyai kapabilitas untuk selalu meningkatkan power.

Bab ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai asumsi Rusia sebagai negara *great power* yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Bagian kedua akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia dalam keterlibatannya di konflik Suriah.

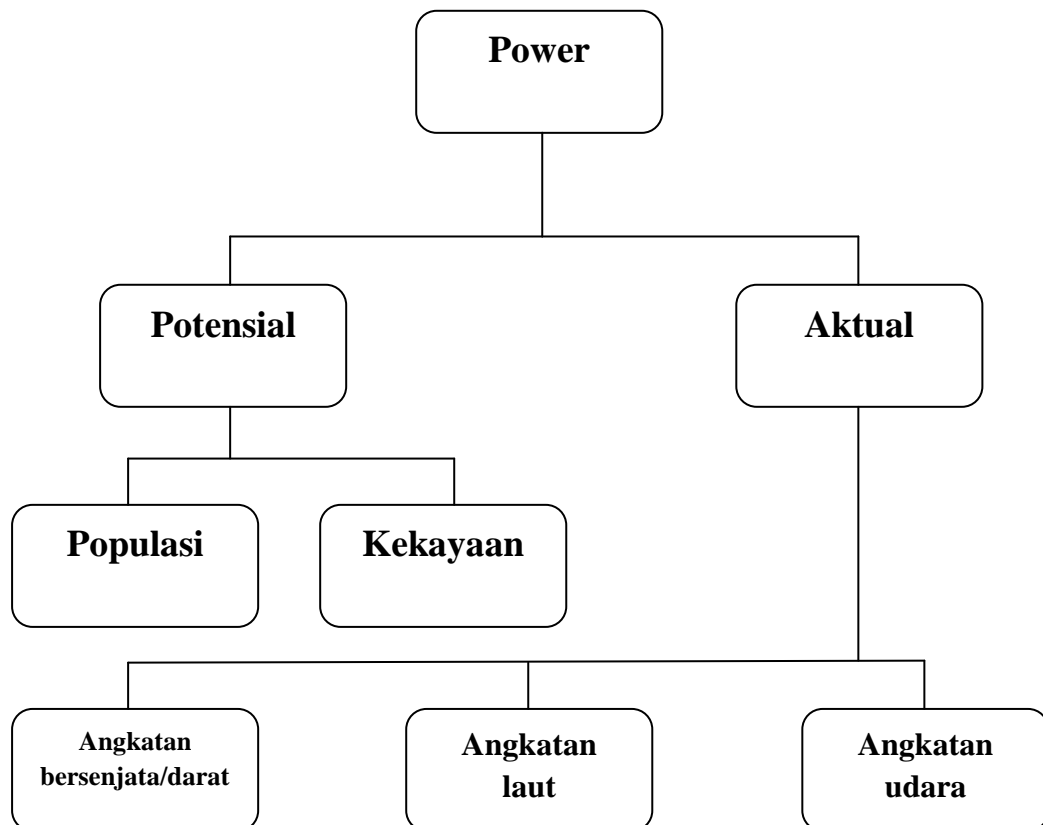
3.1. Rusia sebagai *Great Power*

Merujuk pada pengertian *great power* menurut John Mearsheimer, *power* terbagi menjadi dua macam yakni *power* aktual dan *power* potensial. *Power*

aktual merupakan kapabilitas suatu negara di bidang militer. *Power* ini merupakan *power* yang dianggap paling penting oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya kaitan antara kekuatan militer dengan upaya kontrol dan penaklukan wilayah. Sedangkan *power* potensial adalah kekuatan negara yang dapat diukur dari tingkat populasi dan kekayaan. Walaupun *power* potensial tidak lebih penting dari *power* aktual, namun *power* potensial tidak dapat dipandang sebelah mata oleh negara. Hal ini dikarenakan *power* ini merupakan *building-blocks* dari suatu negara. Populasi dan kekayaan merupakan hal vital untuk mendukung peningkatan kapabilitas militer suatu negara.

Gambar 3.1.

Tipologi Power menurut Mearsheimer



Kemudian, secara tersirat Mearsheimer mengemukakan bahwa pengertian dari *great power* adalah negara-negara yang berupaya *survive* dengan cara meningkatkan *power* yang dimilikinya untuk mencapai keamanan. Hal ini dikarenakan mampu atau tidaknya suatu negara untuk *survive* dalam *self-help world* sangat bergantung pada seberapa besar *power* yang dimiliki negara tersebut. Semakin besar *power* yang dimiliki, maka kemungkinan untuk dapat *survive* juga semakin besar. Negara-negara tersebut tidak pernah menghitung berapa banyak *power* yang ingin mereka miliki. Mereka akan cenderung selalu meningkatkan *power* apabila mereka belum mencapai hegemoni. Meskipun menurut Mearsheimer kecil kemungkinan negara untuk mencapai hegemoni, setidaknya negara yang dikatakan sebagai *great power* harus mampu mempunyai kapabilitas militer yang kuat dan mempunyai pengaruh di wilayah lain.

Pada tahun 1985-1991, Uni Soviet mengalami keterpurukan ekonomi dan politik dibawah pemerintahan Presiden Mikhail Gorbachev. Hal tersebut dikarenakan program *glasnost* dan *perestroika*. *Glasnost* dan *perestroika* merupakan program inisiatif dari Mikhail Gorbachev dimana program tersebut diharapkan menjadi titik awal keterbukaan ekonomi dan politik Uni Soviet. *Glasnost* adalah keterbukaan dan *perestroika* adalah restrukturisasi. Realisasi dari *glasnost* adalah adanya privatisasi perusahaan dan kontrol minyak oleh swasta. Sedangkan realisasi dari *perestroika* adalah transformasi politik dimana politik lebih terbuka dengan mengadaptasi dari proses demokratisasi di negara-negara Barat (Gitomirski, 2010). Akan tetapi, yang terjadi justru ekonomi yang semakin terpuruk, meningkatnya tingkat kriminalitas seperti korupsi, dan protes-protes

terhadap pemerintah oleh masyarakat akibat dari adanya korupsi tersebut (www.history.com).

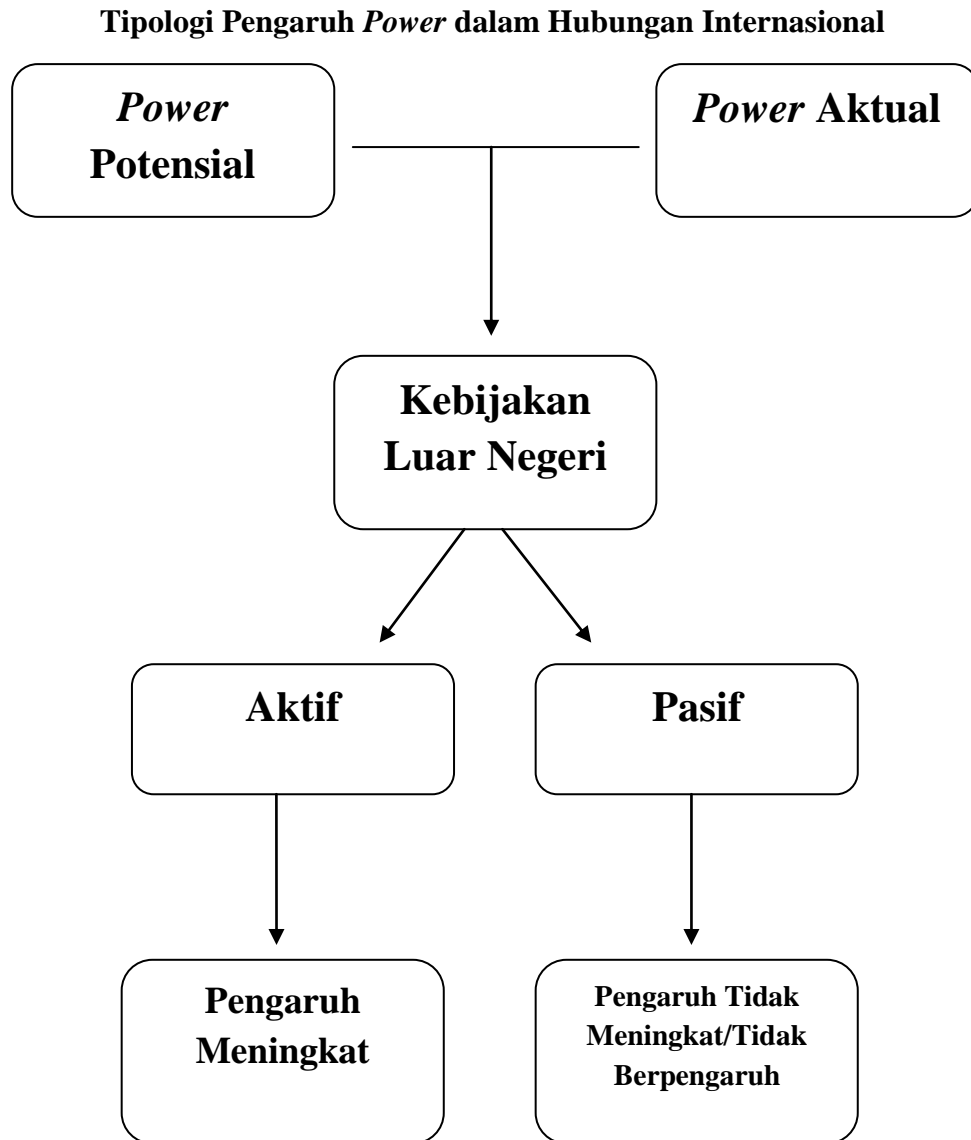
Sebagai negara yang menjadi rival utama Amerika Serikat selama Perang Dingin, tentu saja Uni Soviet mengalami keterpurukan akibat dari adanya *glasnost* dan *perestroika* ini. Keadaan domestik Uni Soviet menjadi semakin berkecamuk ketika *glasnost* membuka pintu untuk gerakan separatisme. Namun, akibat dari ekonomi yang mengalami defisit, maka Uni Soviet pun harus memotong anggaran untuk kepentingan militer (Miller, 2016). Dengan memotong anggaran militer, dampaknya, Uni Soviet tidak hanya tidak mampu untuk mengatasi keadaan domestik, tetapi juga dalam menentukan kebijakan luar negeri, Uni Soviet harus absen (Kanet, 2007).

Kondisi ekonomi domestik Uni Soviet mengalami penurunan yang mengakibatkan penurunan kemampuan militer dan hal ini membawa konsekuensi pada aktivitas politik luar negeri. Keadaan seperti ini mirip yang disampaikan oleh Alexei Arbatov (2004 : 315) berikut ini:

“The military establishment of any society is closely intertwined with the foreign policy of the state; with domestic economic, social, and political conditions and constraints; and with the nation’s historic and cultural tradition.”

Ketika ekonomi dan politik suatu negara yang menjadi komponen dari *power* potensial berperan sebagai *building-blocks* yang memperkuat kapabilitas dari *power* aktual atau kekuatan militer, hal ini bukan tidak mungkin membuat negara tersebut kehilangan kesempatan untuk merumuskan secara prima kebijakan luar negerinya dalam hubungan internasional.

Gambar 3.2.



Selain itu, kebijakan luar negeri merupakan hal terpenting bagi suatu negara apabila negara tersebut berambisi untuk menjadi negara *great power* mengingat *power* tidak hanya direfleksikan sebagai seberapa besar kekuatan militer dan ekonomi suatu negara bila dibandingkan dengan negara lain, tetapi juga seberapa besar pengaruh negara tersebut dalam hubungan internasional. Pengaruh suatu negara tentu tidak mudah diukur. Namun, pengaruh negara dapat dirasakan.

Semakin aktif politik suatu negara, maka semakin besar pengaruhnya. Semakin pasif suatu negara, maka semakin sedikit pengaruhnya.

Pada tahun 1991, Uni Soviet mengalami disintegrasi. Uni Soviet pun terpecah menjadi negara-negara dan Rusia merupakan negara yang terbesar. Pada tahun 1992, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden Rusia. Kebijakan Boris Yeltsin tidak terlalu bertentangan dengan kebijakan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan Boris Yeltsin tetap mengarah pada privatisasi perusahaan dan kebebasan kepemilikan properti untuk masyarakat dimana pemasukan negara akan diperoleh dari pajak (Mankoff, 2009 : 54).

Sejak berakhirnya Perang Dingin dan kemunduran nilai-nilai komunisme, Rusia mengalami pencarian jati diri mengenai apa dan bagaimana identitas untuk negaranya yang akan dianut. Upaya dalam proses pengidentifikasian kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari bagaimana Rusia akan mampu menghadapi ancaman-ancaman dalam dunia yang baru, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pertengahan dekade 1990-an, Rusia mengklaim dirinya sebagai aktor internasional yang independen dimana Rusia tidak akan mencondongkan dirinya terhadap paham kapitalis liberal yang pada masa itu erat kaitannya dengan negara-negara Barat (Mankoff, 2009 : 56).

Percobaan transformasi dari ide komunisme menjadi neoliberal yang diterapkan oleh Boris Yeltsin ternyata tidak membuahkan hasil. Ketidakcocokan Rusia dengan penerapan sistem neoliberal membuat Rusia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada pemotongan anggaran dan jatuhnya pendapatan

per kapita masyarakat Rusia sebesar 44 persen (Mankoff, 2009 : 57) membuat Amerika Serikat melalui International Monetary Fund (IMF) mencetuskan *shock therapy* yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi Rusia. Shock therapy ini dilakukan dengan cara pemberian dana pinjaman kepada pemerintah Rusia sebesar USD 6,8 miliar pada tahun 1995 dan USD 10,1 miliar pada tahun 1996 (Pirani, 2010).

Keterpurukan Rusia di era Boris Yeltsin di bidang ekonomi dan politik pun menyebabkan Boris Yeltsin harus digantikan oleh Vladimir Putin pada tahun 1999. Vladimir Putin membangkitkan patriotisme Rusia yang hilang dengan obsesinya untuk mengembalikan patriotisme untuk menjadikan Rusia sebagai negara kuat dan tetap menjadi *great power* (Oldberg, 2004 : 165). Refleksi dari kembalinya Rusia sebagai *great power* dibawah Vladimir Putin ini pun diwujudkan dalam konsep keamanan nasional yang mencakup kepentingan Rusia dalam banyak aspek seperti ekonomi, politik, militer, budaya, dan sosial yang ditandatangani oleh Vladimir Putin pada tahun 2000 (Lomagin, 2002 : 63).

Rusia mengklaim dirinya sebagai suatu negara *great power*. Konsep *great power* menurut Rusia merupakan negara yang bisa bertanggung jawab atas ancaman-ancaman yang dapat mengarah kepadanya meskipun ancaman-ancaman tersebut tidak berbahaya. Oleh karena itu, Rusia lebih memilih untuk memfokuskan kebijakan luar negerinya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Amerika Serikat sebagai yang utama sebab Amerika Serikat diasumsikan sebagai Great Power yang lain oleh Rusia (Mankoff, 2009 : 66).

“Consequently, Russian foreign policy continues to focus on upholding (or creating) a system of international relations in which larger states are the primary guardians of global order, free to pursue their national interests as they deem fit, respecting one another’s primacy within a circumscribed sphere of influence, and maintaining a general balance of power among themselves.” (Mankoff, 2009 : 121)

Sebagai konsekuensi dari penetapan fokus kebijakan luar negeri Rusia yang mengarah pada negara *great power* yang lain seperti Amerika Serikat, maka Rusia menganggap pentingnya membangun suatu sistem hubungan internasional dimana negara-negara besar menjadi pemeran utama dalam tatanan global. Negara-negara besar berhak untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing selama tidak mengganggu kedudukan satu sama lain dalam hal penetapan pengaruh serta perimbangan kekuatan.

Lebih lanjut, seperti yang dikemukakan oleh Vladimir Putin yang dikutip oleh Jeffrey Mankoff (2009 : 126) bahwa:

“Promoting the interests of the Russian Federation as a great power and one of the most influential centers in the modern world [by] ensuring the country’s security, preserving and strengthening its sovereignty and territorial integrity and its strong and authoritative position in the world community [in order to promote] the growth of its political, economic, intellectual, and spiritual potential.”

Untuk mempertahankan kepentingan nasional seperti pertumbuhan politik, ekonomi, intelektualitas dan potensi spiritual, maka Rusia harus mampu menjamin keamanan negaranya sendiri dengan cara memperkuat kedaulatan, integritas teritorial serta kekuasaannya dalam komunitas internasional. Hal ini sejalan dengan analogi perilaku negara dalam realisme dimana kepentingan

nasional dan keamanan nasional merupakan sebuah refleksi dari sifat kebijakan luar negeri suatu negara.

Pernyataan dari John Mearsheimer menegaskan bahwa

“power only exists only when a state exercises control or influence, and therefore it can be measured only after the outcome is determined. Simply put, the most powerful state is the one that prevails in dispute”.

Pemaknaan dari ungkapan John Mearsheimer ini adalah suatu negara hanya akan dapat mengukur seberapa besar *power* yang dimiliki tergantung apabila ada salah satu kekuatan militer dari negara yang juga *powerful* menantang kekuatan negara lain. Rusia mulai melibatkan diri secara militer dalam konflik di Suriah pada September 2015. Intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia cenderung mengarahkan keberpihakannya kepada rezim pemerintah Suriah. Dalam teori ini, keterlibatan militer Rusia diasumsikan sebagai respon terhadap Amerika Serikat yang sejak tahun 2014 telah melibatkan dirinya secara militer dalam konflik di Suriah. Padahal Suriah merupakan *strategic partner* Rusia.

Sejak keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Iraq di awal 2000-an, Rusia menetapkan beberapa wilayah penting sebagai wilayah *power blocs* untuk membendung pengaruh Amerika Serikat di perbatasan wilayah teritori Rusia. Adapun wilayah *power blocs* yang ditetapkan oleh Rusia adalah kawasan sekitar Laut Kaspia, Asia Tengah, dan Kaukasus (Trenin, 2010).

Gambar 3.3.

Peta Rusia dan Wilayah *Power Blocs*

Sumber: fs.huntingdon.edu

Mempertahankan pengaruh merupakan hal yang terpenting dalam komponen kebijakan luar negeri Rusia. Amerika Serikat sebagai negara yang menjadi patokan dari politik luar negeri Rusia menjadi tantangan tersendiri bagi Rusia dalam keterlibatan keduanya di konflik Suriah. *Offensive realism* meyakini bahwa sistem internasional sangat kuat mempengaruhi perilaku suatu negara. Seperti yang dikemukakan Mearsheimer bahwa

“Offensive realism assumes that the international system strongly shapes the behavior of states. Structural factors such as anarchy and the

distribution of power, I argue, are what matter the most for explaining international politics”

Oleh karena itu, struktur internasional menjadi pengaruh yang cukup signifikan bagi Rusia disamping dalam rangka mempertahankan status *great power* yang dimiliki dimana ini berguna untuk mencapai keamanan dan kepentingan nasional Rusia.

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Rusia di Suriah

3.2.1. Pentingnya Suriah bagi Rusia

Pada tahun 2011, Rusia bersama dengan Tiongkok memveto resolusi DK PBB tentang pemberian sanksi dan penurunan rezim Bashar Al Assad karena tuduhan merespon aksi pemberontakan dengan menggunakan persenjataan militer yang secara prosedural dianggap menyalahi aturan hukum internasional (www.theguardian.com). Perwakilan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, menegaskan bahwa keputusan Rusia untuk memveto resolusi tersebut untuk memudahkan proses perdamaian internal Suriah dengan mengadakan dialog terbuka antara aktor-aktor yang terlibat dan bertanggung jawab dalam perang saudara di Suriah (www.un.org). Rusia berasumsi bahwa resolusi tersebut tidak akan mengakselerasi proses perdamaian Suriah (Techau, 2015).

Rusia mulai melibatkan diri secara militer dengan menerjunkan pasukannya di Suriah pada September 2015 dan membentuk markas tentara di

Selatan Latakia, Suriah Barat Daya. Dalam keterlibatannya tersebut, Rusia tidak berafiliasi dengan koalisi anti-IS yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Rusia lebih memilih untuk berafiliasi dengan Suriah, Irak, Iran, dan kelompok Hizbullah dari Libanon (Kaim dan Tamminga, 2015). Intensitas Rusia dalam memberikan support terhadap Pemerintahan Bashar Al Assad pun semakin meningkat yang ditunjukkan dengan memberikan ekstra pengamanan dalam sistem kontrol udara dan perlengkapan militer canggih lainnya di wilayah Suriah (Techau, 2015). Pengiriman angkatan militer Rusia di Suriah juga telah dikonfirmasi oleh Presiden Vladimir Putin dalam rangka Rusia memerangi terorisme dan pergerakan kelompok-kelompok ekstremis yang dianggap menimbulkan perang saudara di Suriah (Oliphant, 2015).

Suriah merupakan *geopolitical strategic partner* yang terpenting bagi Rusia. Faktor geografis merupakan salah satu komponen yang paling ditekankan dalam teori *offensive realism* karena hal tersebut akan berimplikasi pada kondisi geopolitik suatu negara yang berkenaan dengan hubungannya dengan negara-negara lain dalam regionalnya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari kemungkinan ancaman yang akan diterima. Konsekuensi dari hal ini adalah persepsi Rusia terhadap pentingnya Suriah di wilayah Timur Tengah untuk membendung pengaruh dominasi Amerika Serikat dan gelombang politik di wilayah tersebut (Klein, 2012).

Ada beberapa komponen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia yang dihimpun oleh penulis dari sub-bab "*Russian Foreign Policy: A Quest for Great power Status in Multipolar World*" oleh Mariya Omelicheva dalam buku

kompilasi “*Foreign politics in Comparative Perspective*” yang dapat dielaborasi dengan keterlibatan Rusia di Suriah. Untuk merumuskan kebijakan luar negeri, Rusia memperhatikan letak geografis dan kemungkinan ekspansi Amerika Serikat dan NATO yang dianggap sebagai ancaman yang mampu merubah tatanan dunia. Suriah memiliki posisi geografis yang strategis bagi Rusia. Letaknya di Timur Tengah dan kedekatannya secara politik dengan Rusia dianggap mampu membendung kekuatan Amerika Serikat yang diasumsikan sebagai ancaman. Dan kedatangan Amerika Serikat di Suriah merupakan sesuatu yang jelas tidak diharapkan oleh Rusia dikarenakan hal tersebut dapat menggeser kedekatan Rusia dengan Suriah.

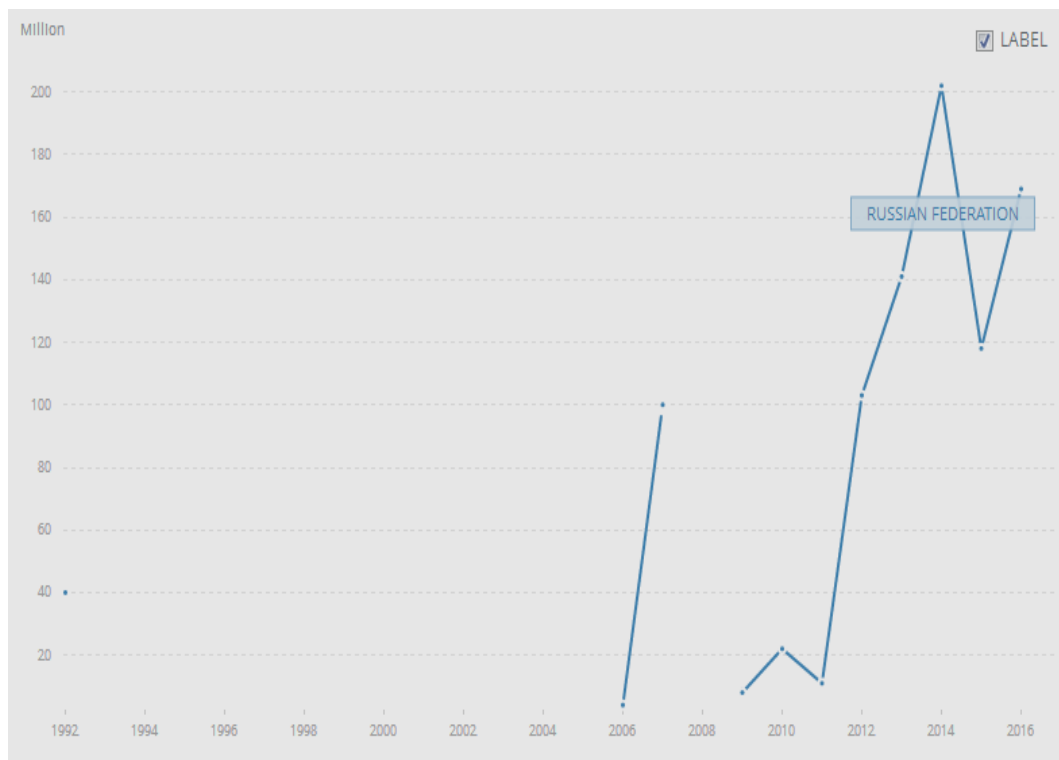
Sehubungan dengan keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah yang merupakan bentuk realisasi dari kebijakan luar negeri Rusia, maka dapat dilihat bahwa keputusan Rusia untuk berpartisipasi dalam konflik tersebut tidak lain berawal dari kedekatan historis yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Rusia merupakan *partner* penting bagi Suriah sebab keduanya memiliki kedekatan politik di era Uni Soviet. Suriah secara terang-terangan membelokkan dirinya kepada blok Timur daripada blok Barat. Kedekatan tersebut dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk menjadikan Suriah sebagai negara pembendung pengaruh Amerika Serikat melalui sekutunya terutama Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Israel di wilayah Timur Tengah pada masa Perang Dingin.

Kedekatan hubungan tersebut berlangsung hingga saat ini. Suriah salah satu negara importir perlengkapan militer terpenting bagi Rusia dimana pada tahun 2010 nilai ekspor perlengkapan militer tersebut mencapai USD 426 miliar

dan menempati posisi ke-empat setelah India, Aljazair dan Vietnam di tahun 2010 (Klein, 2012).

Gambar 3.4.

Grafik Ekspor Perlengkapan Militer Rusia ke Negara-negara di Dunia



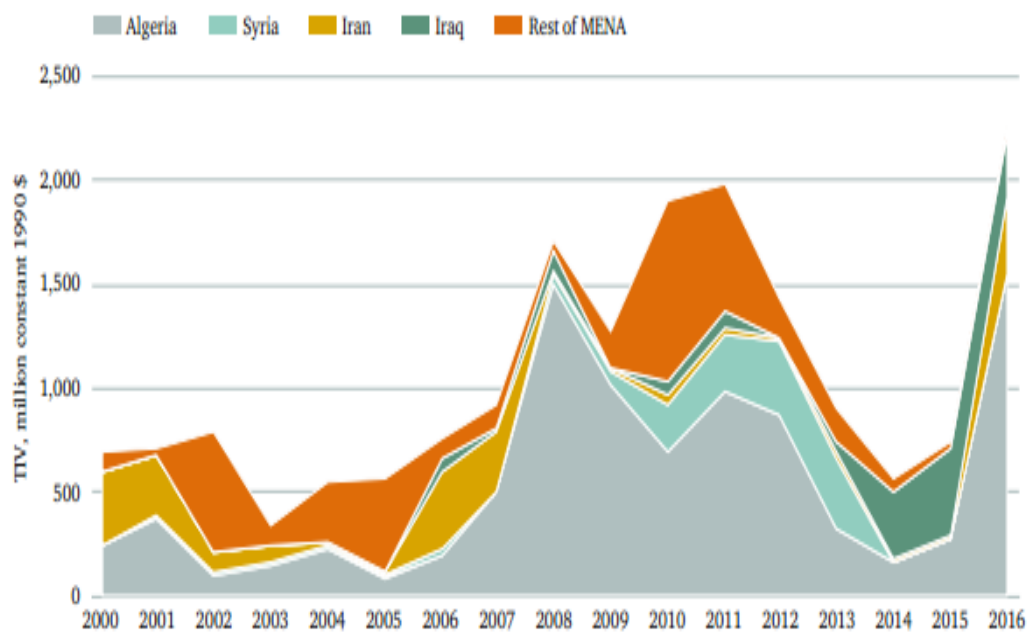
Sumber: www.data.worldbank.org

Grafik tersebut memperlihatkan bahwa ekspor persenjataan Rusia ke negara-negara di dunia meningkat tajam setelah tahun 2011. Tahun 2006, penjualan peralatan militer memang meningkat yakni menyentuh angka USD 100 juta. Namun pada tahun berikutnya hingga 2010 mengalami penurunan. Akan tetapi ekspor senjata mengalami peningkatan yang sangat tajam di tahun 2013 yakni

menyentuh angka USD 200 juta. Berkaitan dengan ekspor peralatan militernya di Suriah, maka dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 3.5.

Ekspor Peralatan Militer Rusia ke Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara



Sources: SIPRI Arms Transfers Database, 2017; authors' calculations.

Diambil dari: Richard Connolly dan Cecile Senstad dalam jurnal "*Russia's Role as an Arms Exporter: The Strategic and Economic Importance of Arms Exports of Russia*".

Kemudian, berikut secara spesifik disajikan data impor peralatan militer oleh Suriah dari negara-negara pengeksport pada tahun 2011-2015 sebagai berikut;

Tabel 3.2.

Data Impor Peralatan Militer oleh Suriah

| Nama Negara | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-------------|
| China | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Iran | 45 | 86 | 20 | 10 | - | - | 161 |
| Rusia | 238 | 282 | 351 | 351 | - | - | 1222 |

*) Angka dalam satuan juta USD

***) Dihimpun berdasarkan tiga negara dengan jumlah ekspor perlengkapan militer terbesar di Suriah

Diolah dari: www.armstrade.sipri.org

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa Rusia merupakan negara pengekspor perlengkapan militer terbesar ke Suriah terhitung dari tahun 2010 hingga 2013. Namun belum diketahui mengapa pada tahun 2014 dan 2015 Suriah tidak melakukan transaksi pembelian perlengkapan militer.

Selain karena Suriah merupakan pasar bagi Rusia dalam urusan persenjataan militer, Suriah juga merupakan pasar Rusia dalam bidang perdagangan dalam komoditi lain seperti misalnya gas, bahan-bahan mentah, dan sebagainya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut disajikan data ekspor perdagangan Rusia ke wilayah tersebut.

Tabel 3.3.

**Data Ekspor Rusia dalam Bidang Perdagangan ke Tujuh Besar Terbanyak
di Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara**

| Nama Negara | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mesir | 1,758 | 2,335 | 3,212 | 2,503 | 4,110 | 3,253 | 15,588 |
| Azerbaijan | 1,477 | 2,196 | 2,846 | 2,942 | 2,144 | 1,676 | 13,281 |
| Iran | 3,360 | 3,278 | 1,900 | 1,169 | 1,326 | 1,017 | 12,050 |
| Aljazair | 1,270 | 1,682 | 2,781 | 1,585 | 798 | 1,192 | 9,308 |
| Suriah | 1,100 | 1,893 | 626 | 360 | 206 | 187 | 4,372 |

*) Angka dalam satuan juta USD

***) Dihimpun berdasarkan tujuh negara pasar ekspor Rusia terbanyak di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara

Data diolah dari: wits.worldbank.org

Dari data yang disajikan di atas, secara ekonomi, Suriah merupakan salah satu negara pasar Rusia terbesar ke-lima di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Suriah merupakan pasar penting bagi ekspor Rusia selain di bidang pertahanan. Selain itu, sampai sekarang Suriah masih menanggung hutang Uni Soviet sebesar 73% dan Suriah merupakan satu-satunya negara yang menjadi rumah bagi pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah Teluk

setelah runtuhnya Uni Soviet. Pangkalan tersebut berada di kota Tartus. Oleh karena itu, sangat penting bagi Rusia untuk membantu menyelamatkan rezim Bashar Al Assad sebab pergantian rezim berkemungkinan akan menimbulkan dampak pada kebijakan yang telah ada. Hal yang paling buruk yang mungkin terjadi adalah perluasan pengaruh Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah akan menghilangkan pengaruh Rusia di regional tersebut dan hal ini akan berdampak pada ancaman terhadap salah satu *strategic partner* Rusia yang lain yaitu Iran (Nizameddin, 2012).

3.2.2. Kelompok Oposisi, ISIS, dan Jabhat Al Nusra

Rusia sangat berpegang teguh pada konsep *centrality of state* dimana negara merupakan pusat kekuasaan yang sah. Konsep ini sejalan dengan pemikiran kaum realis yang menempatkan negara sebagai tatanan tertinggi. Negara yang menciptakan kebijakan dan peraturan sebab negara merupakan kekuasaan tertinggi. Negara merupakan satu-satunya yang bertanggung jawab pada survival dan kepentingan nasional. Pentingnya peran negara dalam menghadapi konflik internal berimplikasi pada upaya Rusia untuk memberikan dukungannya terhadap rezim Bashar Al Assad dari tekanan internasional.

Pada tahun 1998, Rusia mengadopsi hukum federal mengenai pemberantasan terorisme. Dalam hukum tersebut, terorisme didefinisikan sebagai aktivitas kriminal yang dilatar belakangi oleh tujuan politik. Dikarenakan oleh motivasi politik tersebut, Rusia mengasumsikan bahwa semua aktivitas penolakan dan pertentangan terhadap rezim yang sah merupakan sebuah tindakan terorisme.

Implikasinya adalah Rusia harus mengambil tindakan melalui upaya militer untuk menanggulangnya. Langkah ini dinilai tepat oleh Rusia karena menurut Rusia terorisme merupakan suatu ancaman dan serangan yang ditujukan terhadap negara bukan individual. Hal ini dikarenakan stabilitas negara lah yang akan terganggu dari ancaman terorisme ini. Ancaman terorisme bisa berdampak pada gangguan terhadap keamanan dan kepentingan negara (Omelicheva, 2009 : 91 – 95).

Peran Rusia dalam keterlibatannya dalam konflik yang terjadi di Suriah tidak terlepas dari adanya ancaman dari kelompok-kelompok non-pemerintah seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu kelompok oposisi, ISIS, dan Jabhat Al Nusra. Bentuk dukungan Rusia terhadap kelompok rezim yang ditolak oleh Amerika Serikat dan sekutunya merupakan sebuah komitmen terhadap hukum federal Rusia yang mengatur mengenai terorisme di atas. Rusia menempatkan negara sebagai kedaulatan tertinggi. Dengan membantu menyelamatkan stabilisasi Suriah sehingga Suriah bisa bangkit kembali, maka Suriah akan mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan terorisme yang ada di wilayahnya (McKew, 2017).

Relevansi isu terorisme ini dengan teori *offensive realism* adalah dikarenakan kelompok terorisme bukan merupakan aktor terpenting dalam hubungan internasional dimana negara memegang kendali penuh atas konstelasi politik dunia. Kelompok terorisme di Suriah diasumsikan sebagai kelompok yang memerangi pemerintahan yang sah dimana dalam kasus tersebut negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tentu boleh saja bertindak agresif terhadap bentuk-bentuk ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang resmi.

3.2.3. Keterlibatan Amerika Serikat

Menurut John Mearsheimer dalam penjelasannya untuk teori *offensive realism*, negara-negara *great power* mempunyai kecenderungan untuk saling takut terhadap satu sama lain. Di dalam sistem internasional yang anarki, tidak ada kekuasaan tertinggi selain kedaulatan negara. Suatu negara adalah penjamin bagi keamanan nasionalnya sendiri dan suatu negara adalah ancaman bagi negara-negara lain. Negara tidak akan mengetahui bagaimana kapabilitas suatu negara untuk dapat memberikan ancaman terhadap negara-negara lain. Berangkat dari hal tersebut, Amerika Serikat diasumsikan Rusia sebagai negara *great power* yang juga menjadi patokan utama Rusia dalam politik luar negeri pasca Perang Dingin. Kedua negara ini sama-sama mengakui bahwa masing-masing merupakan negara *great power* yang tentu saja mempunyai kapabilitas untuk selalu memaksimalkan *power* yang dimiliki. Berikut merupakan perbandingan *power* antara Rusia dan Amerika Serikat.

Tabel 3.4.

Perbandingan *Power* Rusia dan Amerika Serikat

| Komponen Pemanding | Federasi Rusia (Peringkat 2) | Amerika Serikat (Peringkat 1) |
|-------------------------------|---|--|
| Pasukan | 70,000,000 | 145,215,000 |
| Tank | 15,398 | 8,848 |
| <i>Self-propelled guns</i> | 5,972 | 1,934 |
| Pesawat tempur | 3,547 | 13,444 |
| Kapal perang | 352 | 415 |
| Produksi minyak | 10,110,000 barel per hari | 8,653,000 barel per hari |
| Luas area | 17,098,242 m ² | 9,826,675 m ² |
| Anggaran pertahanan | \$46,600,000,000 | \$581,000,000,000 |

Diolah dari: www.globalfirepower.org 2016

Amerika Serikat secara aktif melibatkan diri dalam konflik Suriah pada tahun 2012 dalam bentuk upaya multilateral dengan sekutunya guna membentuk suatu *dispute settlement* bagi pemerintahan Bashar Al Assad, baik dalam bentuk dukungannya terhadap resolusi PBB 2254 tentang pengisolasian rezim Bashar Al Assad maupun bentuk militer dimana Amerika Serikat memimpin koalisi anti-

ISIS dan memberi dukungan militer terhadap kelompok pemberontak yakni Free Syrian Army (Blanchard, dkk, 2015). Hal ini sangat bertolak belakang dengan upaya keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah, sebab justru sebaliknya, Rusia berafiliasi dengan sekutunya, seperti Iran, untuk terus memberikan dukungan dalam bentuk diplomatik maupun militer kepada rezim pemerintah Suriah. Hal tersebut menjadi pembicaraan pokok dalam pertemuan trilateral antara Rusia, Iran, dan Suriah di Moskow pada awal tahun 2017 (Ahmad, 2017).

Geneva Peace Talks yang diadakan pada tahun 2013 oleh PBB, menjadi awal mula dinginnya hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat dalam memandang dan memposisikan diri dalam konflik Suriah. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar laporan meninggalnya 100.000 jiwa di Suriah yang disebabkan oleh konflik bersenjata sejak tahun 2011. Konflik yang kemudian menjadi konflik bersenjata internasional karena adanya keterlibatan aktor-aktor negara lain tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan oleh PBB karena banyaknya korban jiwa. Rusia yang memveto resolusi PBB 2254 memberikan alasan akan pentingnya membangun kekuatan untuk rezim pemerintah sebab dengan demikian negara tersebut dapat meredam konflik internalnya sendiri dalam kasus ini seperti misalnya munculnya gerakan separatisme dan terorisme. Hal tersebut dibantah oleh Amerika Serikat yang bersikukuh menganggap bahwa kediktatoran pemerintahan Bashar Al Assad lah yang menjadi alasan kuat mengapa konflik terjadi.

Hubungan Amerika Serikat dengan Suriah tidak dapat dikatakan baik. Suriah dikenal sebagai negara yang anti terhadap pengaruh Amerika Serikat di wilayah Teluk. Adanya tuduhan-tuduhan terhadap satu sama lain membuat hubungan kedua negara tersebut cenderung saling berseberangan. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Ronald Reagan menyatakan dukungannya terhadap aksi Israel yang menurunkan pasukan militernya di Libanon untuk melawan Suriah yang berhasrat ingin menguasai Libanon dimana Suriah memberikan dukungannya kepada kelompok Hizbullah yang merupakan pembelot pemerintah Libanon. Oleh karena itu, Suriah dituding sebagai pendukung terorisme internasional oleh Amerika Serikat (Kuncahyono, 2012 – 50 – 51).

Pecahnya konflik di Suriah yang menimbulkan banyaknya korban jiwa menjadi pemicu lain dari memanasnya hubungan Suriah dan Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada tahun 2011 menyatakan bahwa Bashar Al Assad telah kehilangan legitimasi sebagai seorang pemimpin negara. Amerika Serikat menuding Bashar Al Assad sebagai pemimpin yang diktator karena melakukan kekerasan seperti penggunaan senjata kimia dan penembakan pada demonstran yang menginginkannya untuk mundur dari jabatan presiden. Oleh karena itu, Presiden Barrack Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan transisi demokratik dan pencegahan pengapalan senjata ke wilayah Suriah (Kuncahyono, 2012 : 80).

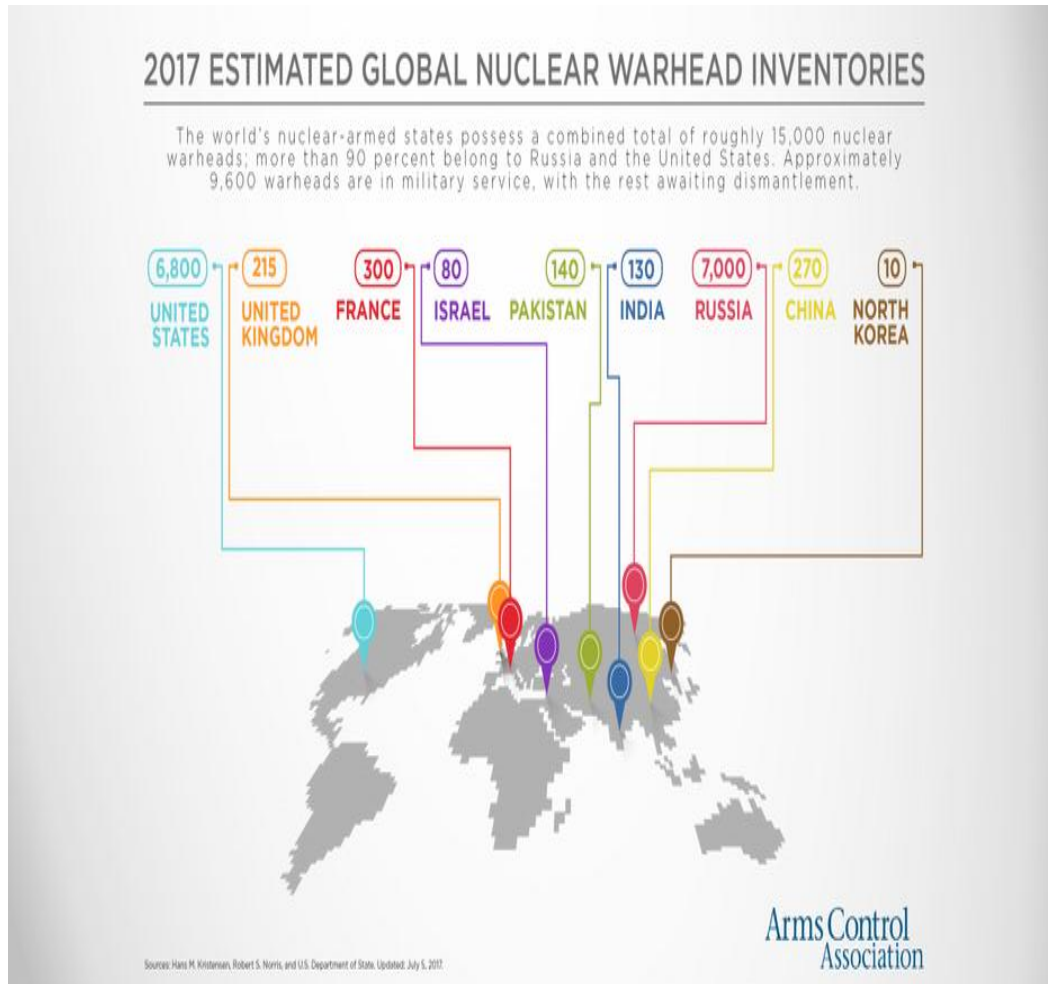
Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan Rusia yang menjadi sekutu Suriah di wilayah Timur Tengah. Rusia tidak menginginkan adanya transisi demokratik

untuk menjatuhkan rezim Bashar Al Assad seperti yang diserukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini lah yang mendasari Rusia untuk melakukan aksi yang dianggap sebagai *dangerous movement* yang pada akhirnya mendapat kecaman dari dunia internasional terutama oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Adapun aksi Rusia tersebut adalah dengan memveto resolusi DK PBB yang berkaitan dengan gagasan Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim Bashar Al Assad, meningkatkan pasokan senjata militer ke Suriah, dan melibatkan diri secara militer dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Hal ini juga berkenaan dengan upaya Rusia untuk melakukan serangan yang lebih intens kepada kelompok pemberontak dan peningkatan keamanan di Kota Tartus di Suriah yang mana menjadi rumah bagi angkatan laut dan kapal nuklir Rusia di wilayah Teluk sesuai dengan kesepakatannya dengan pemerintah Suriah sejak tahun 2008 (Kuncahyono, 2012). Seperti yang diketahui bahwa Rusia merupakan negara penghasil nuklir terbesar di dunia. Disusul Amerika Serikat dan Perancis di urutan kedua dan ketiga. Berikut merupakan daftar negara-negara dengan nuklir terbesar di dunia.

Gambar 3.5.

Daftar Negara-negara dengan Jumlah Nuklir Terbesar di Dunia



Sumber: www.armscontrol.org

Kapasitas Rusia sebagai pemegang kekuatan nuklir terbesar di dunia memberikan keistimewaan tersendiri bagi Rusia. Amerika Serikat yang terus mengembangkan senjata Hipersonic Glide Vehicles (HGV) dimana senjata jenis ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding nuklir, menyadari bahwa kekuatan jenis ini tetap tidak mampu mengalahkan kekuatan nuklir. Rusia yang memegang

peringkat paling atas dalam negara pemegang nuklir di dunia seolah menjadi pegangan tindakan *offensive* untuk memainkan perannya terutama dalam strategi geopolitik. Dampak dari hal ini adalah Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan meremehkan keterlibatan Rusia di Suriah dimana hal ini tentu saja menguntungkan bagi Rusia dengan menyadari kecaman Amerika Serikat dan sekutunya terhadap keterlibatannya di konflik Suriah hanyalah sebatas kecaman yang tidak berdampak apapun.

Dalam keterlibatan kedua negara dalam konflik di Suriah, Rusia melalui Kementerian Luar Negerinya mengatakan bahwa yang dilakukan Amerika Serikat merupakan bentuk dari sebuah agresi (Stromova dan Jamieson, 2017). Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa penyerangan Amerika Serikat menggunakan senjata kimia di Suriah merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi sebab aktivitas tersebut sudah dapat diklasifikasikan sebagai agresi militer sama seperti ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan di Irak sebelumnya (www.mid.ru). Oleh karena itu, Rusia berupaya untuk meningkatkan power di Suriah supaya dapat membendung kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya dalam upayanya untuk menurunkan Bashar Al Assad. Berikut merupakan perbandingan kekuatan militer Rusia dan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah.

Tabel 3.5.

Perbandingan Kekuatan Militer Rusia dan Amerika Serikat Tahun 2015

| Komponen | Rusia | Amerika Serikat |
|---|--------------|----------------------------|
| Pasukan | 200,000 | 800,000 (termasuk koalisi) |
| Tank | 4,000 | 389 |
| Kapal perang | 48 | 47 |
| Rata-rata serangan dalam 100 hari | 5,600 | 3,500 |
| Pengeluaran selama keterlibatan dalam konflik di Suriah | USD 300 juta | USD 11,4 juta |

Diolah dari: www.sputniknews.com

Berdasarkan data di atas, kecenderungan Rusia untuk melakukan tindakan *offensive* dalam upayanya menjadi penguasa tunggal di Suriah jelas terlihat dari bagaimana Rusia meningkatkan *power* melalui kekuatan militer, baik dari serangan yang dilakukan maupun jumlah persenjataan yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan obsesi Rusia dalam keterlibatannya dalam perang di Suriah tidak

hanya sekedar *defensive*, tetapi Rusia mempersepsikan Amerika Serikat sebagai ancaman yang nyata dalam upaya ekspansi pengaruhnya di wilayah Timur tengah.

Rusia memandang Amerika Serikat sebagai *sverkhderzhava* (*superpower*) dan Rusia adalah *derzhavnost* (*mirror*). Implikasi dari hubungan *sverkhderzhava* dan *derzhavnost* ini adalah bahwa setiap kebijakan luar negeri *derzhavnost* merupakan respon atau bentuk lain yang berkaitan dengan *sverkhderzhava*. Hal ini penting untuk menyamakan kedudukan antara Rusia dan Amerika Serikat sebagai *global leading states* yang bertugas untuk menjaga stabilitas global. Dalam konflik yang terjadi di Suriah, Amerika Serikat pertama kali melakukan intervensi secara militer pada tahun 2014 dengan keberpihakan pada kelompok oposisi. Sebagai negara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai fokus utama dari kebijakan luar negerinya, maka penting bagi Rusia untuk memberikan respon terhadap tindakan Amerika Serikat di Suriah dengan mengirimkan pasukan militernya pada tahun 2015 dengan keberpihakan pada kelompok pemerintah (Mankoff, 2007).

3.2.4. Implikasi *Vedushchie Mirovye Derzhavy* yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia di Suriah

Teori *offensive realism* merupakan teori yang sebenarnya tidak memberikan fokus terlalu besar terhadap ideologi dan tipe pemimpin suatu negara. Namun, *offensive realism* menganggap bahwa ideologi atau tipe pemimpin suatu negara dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan